

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, R., Damanik, J., & Daryanti, S. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Di Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, Studi Komparasi UIN Sunan Kalijaga, Universitas Brawijaya dan Universitas Gadjah Mada (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Aprisiami, P. (2012). Penerapan Otonomi Desa Dalam Menguatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Aglik, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Yogyakarta).
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Metodelogi penelitian*. Bina Aksara. Yogyakarta
- Deviyanti, D. (2013). Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah. *Journal Administrasi Negara*, 1(2).
- Eko, S., & Dwipayana, A. (2003). *Membangun Good Governance Di Desa*. Institute for Research and Empowerment, Yogyakarta.
- Fikri, A. (2015). Fikih Ramah Difabel. INKLUSI, 2(1).
- Ferdinand, B. T. (2012). Partisipasi Warga Sekolah Dalam Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif Di Sd Negeri Gejayan (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Yogyakarta).
- Hessel Nogi S Tangkilisan. (2005). *Manajemen Publik*. PT. Grasindo. Jakarta.
- Isbandi, R. A. (2007). Perencanaan Partisipatoris Berbasis AsetKomunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan. FISIP UI Press. Depok.
- Jayani, A. D., & Sos, D. A. D. S. (2014). Konstruksi Different Abled People (Difabel) Studi mengenai Pandangan Mahasiswa Difabel terkait Konstruksi Difabelitas di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Kriyantono R. (2007). *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Publik Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mikkelsen, Britha. (1999). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upayaPemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para pratisi lapangan*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Munadhiroh. (2011). Korelasi Mengikuti Pengajian Majlis Dzikir Al Khidmah dengan Ukhudah Islamiyah Jama'ah di Kec Weleri Kab Kendal. Diss. IAIN Walisongo.

- Munawaroh, S. (2013). Pemenuhan Aksesibilitas kampus Inklusi (Studi Kasus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA).
- Moleong, L. J. (1995). *Metode penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Napitupulu, R. H. (2013). Landasan Konseptual Perencanaan Dan Perancangan Pusat Pelayanan Difabel Di Yogyakarta Berdasarkan Pengolahan Sirkulasi Dan Pengolahan Tata Ruang Dalam Bersuasana Homey (Doctoral dissertation, UAJY).
- Nuryani, E. (2016). Partisipasi Anggota Dalam Pengelolaan Kelompok Ternak Sapi Studi Kasus Kelompok Ternak Ngudi Makmur Di Tegalrejo, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. *Bachelor Thesis*, Universitas Gajah Mada.
- Shadily Hasan. (1989). *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Sadewo, W., & Amalinda Savirani, S. I. P. (2015). SIGAB: Panji Perjuangan Difabel di Yogyakarta (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Skjørten, M. D. (2001). Menuju Inklusi dan Pengayaan. dalam Pendidikan Kebutuhan Khusus: Departemen Pendidikan Nasional, Braillo Norway, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
- Sujana, R. (2016). *Mewujudkan inklusi sosial program peduli*. Advisor PNPM Peduli.
- Suryaden, A., (2014). Integrasi Difabilitas Di Implementasi Undang-Undang Desa dan PP 43 dan 60 Tahun 2014.
- Syafi'ie, M. (2016). Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas. INKLUSI, 1(2).
- Toriqi, A. (2015). Analisis Yuridis Tentang Pengaturan Pengelolaan Anggaran Dana Desa Berdasarkan Otonomi Desa (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum).
- Utami, N. W. (2015). Gelap dalam Gemerlap: Gelapnya Akses Informasi Bagi Difabel dalam Gemerlap Era Digitalisasi. CHANNEL Jurnal Komunikasi, 3(2).

Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) Pasal 31

Piagam Hak Asasi Manusia (TAP MPR-RI No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2011 Tentang Ratifikasi CRPD

Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Kulonprogo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas.

Website:

Lihat Chowdhury, Oli M. Abdullah, "Children with Different Abilities", The Daily Star, 25 Juli 2004. Diunduh dari <http://www.thedailystar.net/law/2004/07/04/human.htm>

<http://dinkes.kulonprogokab.go.id/cetak.php?id=485> pada sabtu 18 juni 2016 pukul 22.40 WIB.

<http://sidorejo-kulonprogo.sid.web.id/index.php/first> pada sabtu 18 juni 2016 pukul 23.00 WIB.

<https://daksablog.wordpress.com/2013/05/10/pengertian-inklusi/> pada senin 24 Oktober 2016 pukul 10.30 WIB.